

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PENGANGGARAN ELEKTRONIK (E-BUDGETING) PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Fira Aisyah Meilani¹, Gita Sonia Marpaung^{2,3}, Nazwa Adinda³,
Nasirwan⁴

Universitas Negeri Medan

e-mail: firaaisyahmeilani@gmail.com¹, gitasoniamarpaung@gmail.com²,
adindanazwa93@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penganggaran Elektronik (E-Budgeting) menjadi inovasi penting dalam transformasi digital sektor publik, khususnya di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan literatur yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Budgeting di sektor pemerintahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur yang melibatkan studi dokumen internasional dan nasional terkait, seperti publikasi akademis, peraturan pemerintah, jurnal, dan buku. Studi ini menyoroti tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi E-Budgeting, yaitu dukungan manajemen, kebijakan organisasi, dan ketersediaan sumber daya. Dukungan manajemen yang kuat, kebijakan organisasi yang mendukung, ketersediaan sumber daya yang memadai dan resistensi terhadap perubahan menjadi faktor kunci dalam menghadapi hambatan implementasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang dan melaksanakan sistem E-Budgeting yang efektif di lingkungan pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: E-Budgeting, Sektor Pemerintahan, Implementasi, Faktor-Faktor Pengaruh.

Abstract—*Electronic Budgeting (E-Budgeting) has emerged as a crucial innovation in the digital transformation of the public sector, particularly in Indonesia. This article aims to provide a comprehensive literature review on the factors influencing the implementation of E-Budgeting in the Indonesian government sector. The research method employed is a literature review involving the study of relevant international and national documents such as academic publications, government regulations, journals, and books. This study highlights three main factors influencing the success of E-Budgeting implementation: management support, organizational policies, and resource availability. Strong management support, supportive organizational policies, adequate resource availability, and resistance to change are key factors in overcoming implementation barriers. These findings are expected to contribute to the design and implementation of effective E-Budgeting systems in the Indonesian government context.*

Keywords: *E-Budgeting, Government Sector, Implementation, Influencing Factors.*

PENDAHULUAN

Penganggaran Elektronik (E-Budgeting) merupakan salah satu inovasi penting dalam transformasi digital sektor publik, termasuk di dalamnya pemerintahan. E-Budgeting, atau penyusunan anggaran secara elektronik, memiliki peran penting dalam memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia, terutama dalam sektor pemerintahan. Penerapan sistem ini sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam konteks PP 58/2005, transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Hal ini juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penggunaan E-Budgeting

diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut.

E-Budgeting memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki proses penganggaran, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Namun, implementasi E-Budgeting di sektor pemerintahan tidak selalu berjalan lancar dan sering kali dihadapi dengan berbagai hambatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi E-Budgeting di sektor pemerintahan sangatlah kompleks. Dukungan yang kuat dari pihak manajemen, kebijakan organisasi yang mendukung, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta minimnya resistensi terhadap perubahan merupakan beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi. Studi literatur tentang faktor-faktor ini sangatlah penting untuk memberikan wawasan yang lebih dalam bagi praktisi dan peneliti dalam menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan E-Budgeting.

Dalam konteks Indonesia, implementasi e-budgeting telah menjadi fokus utama dalam upaya reformasi pengelolaan anggaran publik. Berbagai studi telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Budgeting di Indonesia. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan tinjauan literatur yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang secara khusus berpengaruh dalam konteks sektor pemerintahan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Budgeting di sektor pemerintahan Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan sistem E-Budgeting yang efektif di lingkungan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan tinjauan literatur merupakan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Literature review adalah karya orisinal yang merangkum dan mensintesis penelitian sebelumnya tentang suatu topik (Thorne dkk., 2019). Penelitian literature review berisi ulasan, rangkuman, serta pemikiran penulis dengan melakukan peninjauan berbagai dokumen baik internasional maupun nasional, seperti publikasi akademis, publikasi pemerintah, undang-undang, jurnal, buku, berita media, dan catatan lain yang relevan (Massaro dkk., 2016; O'Connor dkk., 2017; Yuhertiana, 2015). Tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi detail yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain atau peneliti sebelumnya (Alahi & Mukhopadhyay, 2019; Suryanarayana & Mistry, 2016). Proses tinjauan literatur umumnya terbagi menjadi tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Santis dkk., 2018; Zhu dkk., 2018). Metodologi penelitian dalam studi ini didasarkan pada langkah-langkah yang terstruktur.

Pertama, kajian literatur membantu membangun kredibilitas peneliti dengan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Budgeting dalam sektor pemerintahan. Kedua, kajian literatur menghubungkan penelitian yang akan dilakukan dengan wacana luas dalam literatur tentang E-Budgeting, menutupi jurang antara penelitian yang ada dan rencana penelitian baru. Ketiga, kajian literatur menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan dan merangkum apa yang sudah diketahui orang lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Budgeting. Keempat, kajian literatur dapat menghasilkan pemikiran baru

dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih belum jelas dalam implementasi E-Budgeting dan memberikan wawasan serta hipotesis baru untuk penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tinjauan literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi E-Budgeting di sektor pemerintahan Indonesia dapat dikategorikan menjadi empat aspek utama, yaitu dukungan manajemen, kebijakan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan.

Dukungan Manajemen

Sistem manajemen keuangan yang mana masih kontradiktif dengan tujuan pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua bidang pemerintahan, dengan adanya transparansi terkait anggaran daerah dapat menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan penerapan E-Government. Jadi E-Government merupakan bentuk aplikasi good governance yang merupakan suatu perkembangan teknologi dalam dunia pemerintahan, yang bisa menghubungkan pemerintah, bisnis, maupun masyarakat. Maksud penerapan E-Gov adalah agar sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Keuntungan dari penerapan E-Gov, antara lain: Pertama, tertib administrasi. Kedua, mempercepat proses layanan umum. Ketiga, meringankan pekerjaan lembaga daerah untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat pemerintah terendah. E-Budgeting merupakan salah satu bentuk aplikasi E-Government dalam bidang anggaran. E-budgeting bisa diartikan sebagai informasi data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Dimana sistem ini menyangkut pengelolaan uang rakyat (public money) yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional, dan berkeadilan termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Sedangkan reformasi anggaran tersebut (budgeting reform) itu sendiri meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Adanya E-Budgeting dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong kepercayaan publik. Pemanfaatan E-Budgeting di pemerintah daerah dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom (Sosiawan, 2008).

Pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi dengan cara mengunggah dokumen publik kepada masyarakat melalui situs web ataupun jaringan yang diketahui oleh khalayak umum agar kedua belah pihak (pihak agen dan prinsipal) dapat memberikan feedback ataupun memperoleh manfaat atas informasi yang tersedia.

Keberhasilan kebijakan penerapan E-Budgeting dan sistem pengendalian manajemen, dapat dibuktikan dengan terwujudnya transparansi yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, akuntabilitas dalam penyusunan APBD lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih terukur, serta efektifnya penetapan APBD yang dilakukan tepat waktu dan berhasil melakukan efisiensi pada anggaran belanja (Dini dkk., 2019).

Kebijakan Organisasi

Organisasi sektor publik sebagai badan yang identik dengan pemerintahan negara merupakan suatu lembaga yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga organisasi sektor publik bukan mementingkan laba sebagai target akhirnya (Bastian, 2019; Sujarweni : 20, 2016). Sebagai representasi Negara, organisasi sektor publik memiliki peran yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sehingga selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan masyarakat (Sururi, 2019).

Adanya mekanisme atau prosedur kerja di dalam sebuah pengelolaan kebijakan. itulah yang dinamakan dengan Struktur Birokrasi (Juliar & Dahtiah, 2020). Sebuah struktur birokrasi memiliki fungsi penting terkait sebuah kebijakan yaitu dengan menyusun Standard Operating Procedures (SOP). Berdasarkan struktur birokrasi pengaplikasian kebijakan E-Budgeting sesuai dengan SOP yang berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006 yang membahas soal pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diganti menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007, Permendagri No. 33 tahun 2019, Peraturan No. 58 tahun 2005 dan Pedoman Tahunan APBD.

Masing-masing daerah memiliki struktur birokrasi yang berbeda dalam penerapan E-Budgeting sebagai wujud dalam pengelolaan anggaran. Seperti pada Pemerintah Kota Surakarta yang dinaungi oleh tiga instansi inti yaitu BPPKAD, Bappeda, dan Diskominfo SP Kota Surakarta (Julianty, 2020). Berbeda dengan struktur birokrasi dari Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan E-Budgeting, dalam studi Juliar & Dahtiah (2020) E-Budgeting Kota Bandung sendiri sudah mempunyai Peraturan Wali Kota dalam standar kebijakan dalam pengelolaan sistem E-Budgeting. Untuk melaksanakan kebijakan E-Budgeting, pihak-pihak yang mengoperasikan dan menggunakan E-Budgeting yaitu SKPD yang menginput anggaran dan selanjutnya pihak TAPD yang merekap anggaran yang telah diinput oleh SKPD sebelumnya. TAPD dikepalai oleh Sekda, Bappelitbang, BPKA, dan Diskominfo.

Ketersediaan Sumber Daya

Dalam pengimplementasi sebuah kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya fisik maupun non fisik. Keberhasilan dari penerapan kebijakan yang dilakukan oleh implementator sangat didukung oleh adanya sumber daya fisik. Untuk memperlancar dalam proses pengelolaan sebuah kebijakan, sumber daya fisik sangat diperlukan dalam hal tersebut. Jika tidak adanya sumber daya fisik yang layak, maka penerapan sebuah kebijakan tidak bisa berjalan efektif.

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan suatu penerapan E-Budgeting salah satunya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, maka diperlukan adanya sumber daya yang paham dan kompeten untuk menjalankan suatu program, idealnya sumber daya manusia yang dimiliki haruslah kompeten dalam hal E-Budgeting, seperti dalam hal pengelolaan keuangan, sistem informasi, dan lainnya (Gamayuni, 2020). Dengan demikian, hasil ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Saputra dkk. (2019) yang menyatakan efektivitas implementasi kebijakan E-Budgeting dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya.

Tingginya kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di organisasi sektor publik dapat berkontribusi pada penyebaran keberhasilan peningkatan sistem informasi dalam mencapai tujuannya. Tingkat pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan merupakan indikator yang baik dari kualitas sumber daya seseorang (Anjani & Wirawati, 2018). Selain itu perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi

standart untuk bidang keuangan, serta untuk memberikan pengendalian yang sesuai dalam menopang kinerja manajemen dalam sebuah organisasi terutama dibidang informasi internal.

Kemudian, tidak hanya sumber daya manusia yang mendukung implementasi E-Budgeting melainkan terdapat sumber daya finansial sebagai salah satu penentu keberhasilan. Misalnya Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan nilai yang besar untuk pelaksanaan E-Budgeting yang sedang berjalan saat ini (Julianty, 2020). Selain sumber daya tersebut, juga terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan E-Budgeting, antara lain mesin atau server yang dikembangkan oleh Pemerintah dan metode norma atau peraturan yang dipakai.

Selain berbagai sumber daya pendukung yang telah dijabarkan, terdapat pula hambatan sumber daya yang sering dialami dalam penerapan E-Budgeting yaitu koneksi internet, hardware, dan software yang kurang mumpuni. Hal ini sejalan dengan penelitian Adila & Dahtiah (2020) yang menyimpulkan bahwa kondisi fasilitas sangat menunjang penerapan e-budgeting. Penelitian Gamayuni (2020) juga menyimpulkan bahwa penerapan E-Budgeting di provinsi lampung terhambat dikarenakan hardware yang kurang mumpuni.

Resistensi Terhadap Perubahan

Berbagai perubahan dalam akuntansi sektor publik Indonesia baik itu dalam penerapan teknik maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, ditujukan agar tercapai pengelolaan keuangan negara yang baik. Segala perubahan tersebut mengarah pada tuntutan agar terbentuknya kelembagaan pemerintah yang akuntabel, transparan serta dapat menanggapi akan reformasi secara efektif.

Teknologi menjadi salah satu tanda adanya perubahan atau kemajuan zaman. Perkembangan teknologi ini menjadikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama menjadi semakin cepat serta praktis.

Menurut Zubaidi dkk. (2019) dalam penelitiannya tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menyimpulkan bahwa pengimplementasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibandingkan memakai metode interaktif tradisional dinilai mempunyai keunggulan tersendiri yang tentunya lebih menguntungkan sehingga menjadi tujuan utama penerapan TIK tersebut. Hal tersebut sejalan dalam mendukung jalannya organisasi sektor publik agar terus melakukan pengembangan dan perubahan dalam pelayanan sektor publik. Dalam pengelolaan birokrasi sektor lembaga-lembaga negara, pemanfaatan TIK ini dikenal dengan sebutan E-Government (Wahyuningsih & Purnomo, 2020a).

Penerapan E-Budgeting sangat berdampak positif terhadap pengelolaan anggaran pemerintahan. Sebagai contoh pada pemerintahan di Kota Batu, sebelum dilaksanakan E-Budgeting banyak terjadi kesalahan entry manual anggaran (kesalahan entry data karena kurang tepat dan tidak sinkron dengan kode rekening) dan setelah dilaksanakan E-Budgeting membuktikan kesuksesan ebudgeting.

Dalam penelitian Andhayani (2020) membuktikan bahwa pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah dalam hal E-Budgeting dari awal rancangan, pelaksanaan telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan untuk perbaikan walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam hal teknologi, penerapan dalam sistem.

Terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan E-Budgeting pada Kota Batu yaitu sistem yang belum terkoordinasi atau terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga menyebabkan waktu untuk entry data sangat terbatas sehingga khawatir akan ketepatan angka dan kode rekening yang dimasukkan, ketepatan waktu entry data, adanya data yang

tidak sama antara di sistem E-Budgeting, ajuan hardcopy ataupun softcopy.

Keberhasilan perubahan ini, pada akhirnya sangat tergantung pada efektivitas, transparansi, dan pengelolaan manajemen sumberdaya manusia yang efektif terutama kemampuan sumber daya publik dalam tataran pemerintahan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Budgeting dan E-Government memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Materi tersebut menggambarkan bahwa sistem manajemen keuangan pemerintah yang masih kontradiktif dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas, memerlukan langkah-langkah konkret untuk diperbaiki. Salah satu langkah tersebut adalah dengan menerapkan E-Government, yang merupakan aplikasi dari prinsip good governance dalam bentuk teknologi untuk menghubungkan pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

Penerapan E-Budgeting menjadi salah satu bentuk implementasi E-Government dalam bidang anggaran. E-Budgeting memungkinkan informasi keuangan dapat diakses secara transparan dan efisien, membantu dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan adanya E-Budgeting, proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Hal ini berdampak positif pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, implementasi E-Budgeting tidaklah mudah dan menghadapi beberapa kendala, termasuk resistensi terhadap perubahan. Tantangan ini dapat diatasi dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Sumber daya fisik dan finansial juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti koneksi internet, hardware, dan software yang kurang mumpuni yang perlu diatasi.

Dari keseluruhan materi, dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Budgeting dan E-Government merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kinerja dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi E-Budgeting dan E-Government:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia: Perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam bidang E-Budgeting. Peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang sistem tersebut akan membantu dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan dan memastikan keberlanjutan implementasi.
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam infrastruktur teknologi seperti koneksi internet yang handal, perangkat keras yang memadai, dan perangkat lunak yang terintegrasi akan membantu dalam meningkatkan kinerja sistem E-Budgeting dan E-Government. Hal ini juga akan mengurangi kendala teknis yang sering dialami dalam implementasi.
3. Pengembangan Kerjasama Antarinstansi: Diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai instansi pemerintah dalam mengimplementasikan E-Budgeting dan E-Government. Koordinasi yang baik akan membantu dalam memastikan integritas data, konsistensi proses, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

4. Perbaikan Proses dan Standar Operasional: Evaluasi terhadap proses dan standar operasional yang ada perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah perlu aktif mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan publik. Melalui transparansi dan keterlibatan yang lebih besar, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan, dan pengawasan atas penggunaan dana publik dapat lebih efektif.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan implementasi E-Budgeting dan E-Government dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanani Rohma, F. (2023). Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (E-Budgeting) Pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(1).
- Gilang, P. (2020, March). Literature Review : Pengertian, Metode, Manfaat, dan Cara Membuat. *Gramedia.Com*.
- Marwan Prayoga, F., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *Journal of Public Sector Innovation*, 5(2), 68–79.
- MURFA SURYA MAHARDIKA. (2020). E-BUDGETING. PT. Murfa Surya Mahardika.
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 64–70.
- Wijayanto, H. (2015). TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MELALUI PENERAPAN E-BUDGETING. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 1(1), 72–88.